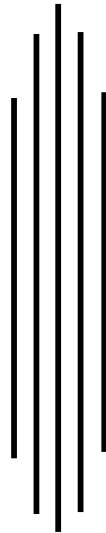




**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPP KORPRI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014**



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI
KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2014**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

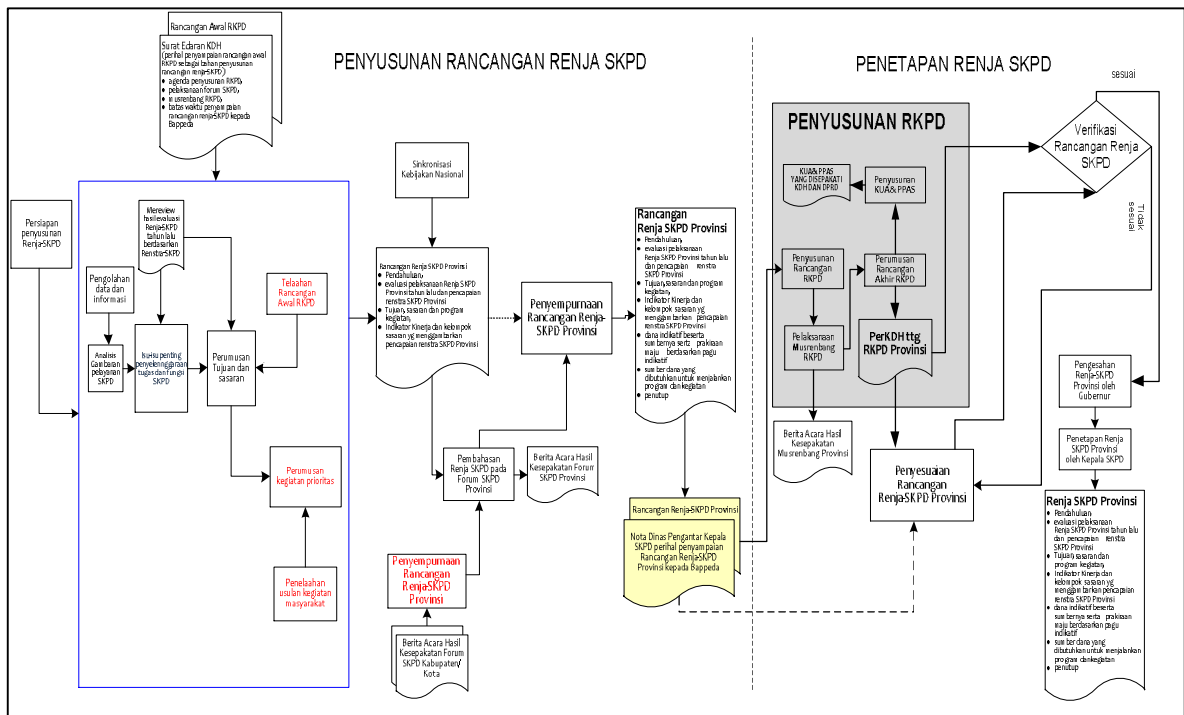
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah. Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah menjabarkan Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai pedoman SKPD Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

1.4. Sistematika Penyusunan SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-----|----------|-----|-----|
| 1. Sosialisasi Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 | Terlaksananya sosialisasi Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 | - | - | 14 orang DP KORPRI Kab/Kota, 18 orang DP Unit Provinsi KORPRI Instansi Vertikal dan 128 orang DP Unit Provinsi KORPRI dinas/badan | 14 orang DP KORPRI Kab/Kota, 18 orang DP Unit Provinsi KORPRI Instansi Vertikal dan 128 orang DP Unit Provinsi KORPRI dinas/badan | 100 | - | - | - |
| 2. Pendidikan khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi PNS/Anggota KORPRI | Terlaksana PKPA bagi PNS/Anggota KORPRI | | | 1 orang | 1 orang | 100 | 4 orang | 100 | 100 |
| 3. Pembinaan rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana Pembinaan Rohani bagi PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | 3 kali | 75 | 75 |
| 4. Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI Kep. Babel Tahun Anggaran 2011 | Terlaksana pengukuhan dan pelantikan sehingga terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten/kota | | | Terlaksananya pengukuhan dan pelantikan sehingga terbentuk kepengurusan Dewan Pengurus Kab/Kota, DP Unit Provinsi dan DPP KORPRI | Terlaksananya pengukuhan dan pelantikan sehingga terbentuk kepengurusan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung dan Muscab Belitung Timur | 85 | | 90 | 90 |
| 5. Pembekalan Teknis bagi PNS yang akan memasuki Masa Purnabhakti | Terlaksana Pembekalan teknis bagi PNS yang akan memasuki Masa Purnabhakti | | | | | | 45 orang | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|-----|-------------------|-----|-----|
| 1. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Antar Anggota KORPRI Provinsi kep. Babel dengan Kab.Kota | | | | Pertandingan olahraga meliputi 7 cabang olahraga dan 1 cabang olahraga rekreasi yaitu: (1)Tennis Lapangan (2)Tennis Meja (3)Volley Ball (4)Bulutangkis (5)Catur (6)Futsal (7)Sepakbola (8)Gaple | Terlaksananya pertandingan olahraga meliputi 7 cabang olahraga dan 1 cabang olahraga rekreasi yaitu: (1)Tennis Lapangan (2)Tennis Meja (3)Volley Ball (4)Bulutangkis (5)Catur (6)Futsal (7)Sepakbola (8)Gaple | 100 | - | - | - |
| 2. Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke 13 Tahun 2013 | Terlaksananya Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke-13 Tahun 2013 | | | | | | 6 Cabang Olahraga | 100 | 100 |
| 3. Pembentukan Kepengurusan BAPOR KORPRI Kep. Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018 | Terbentuknya kepengurusan BAPOR KORPRI Kep. Babel Masa Bhakti 2013-2018 | | | | | | 1 kali | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lembar
.....
Dari
.....

Nama SKPD : Sekretariat DPP KORPRI

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemberian Penghargaan Kepada PNS yang Memasuki Masa Purnabhakti dan Bantuan Kepada PNS/CPNS yang Sakit dan Meninggal Dunia | Pk. pinang | | | 3.486.880.000,00 | | Pk. pinang | | | 3.486.880.000,00 | |
| 2 | Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tk. Nasional II Banda Aceh 2014 | Prov. Kep. Babel | | | 472.280.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 472.280.000,00 | |
| 3 | Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pk. pinang | | | 213.270.000,00 | | Pk. pinang | | | 213.270.000,00 | |
| 4 | Pembentukan LKBH KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Prov. Kep. Babel | | | 233.200.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 233.200.000,00 | |
| 5 | Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Prov. Kep. Babel | | | 151.675.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 151.675.000,00 | |
| 6 | Persiapan, Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan DP Kab/Kota KORPRI, DP Unit Provinsi Kep. Babel Tahun 2013 | Prov. Kep. Babel | | | 57.390.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 57.390.000,00 | |
| | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | | | | | | | | | | |
| 7 | Pelatihan Instruktur Senam Buger KORPRI bagi Sekretariat Kab/Kota dan SKPD dan Instansi Vertikal di Provinsi Kep. Bangka Belitung | Prov. Kep. Babel | | | 349.408.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 349.408.000,00 | |
| 8 | Silaturahmi dan Pertandingan Olahraga antar KORPRI Provinsi Jawa Barat | Prov. Kep. Babel | | | 540.955.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 540.955.000,00 | |
| 9 | Pertandinagn Olahraga Antar Unit KORPRI se Provinsi Kep. Babel | Prov. Kep. Babel | | | 373.133.000,00 | | Prov. Kep. Babel | | | 373.133.000,00 | |
| | | | | | 4.614.695.000,00 | | | | | 4.614.695.000,00 | |

2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

Pada tahun 2012, Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 1(satu) urusan wajib, yaitu urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Urusan Wajib yang dilaksanakan

Pada tahun 2012 urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.086.852.533,00 Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.207.100.382,00 atau 63,04%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.879.752.151 atau 36,96%. Rincian uraian belanja adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp.592.800.000,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.592.800.000,00 (tidak mengalami penambahan/pengurangan) dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.496.753.646 atau 83,80%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 96.046.354,00 atau 16,20%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. (Nama Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat)

output : (Terkirimnya surat menyurat).

2. (Nama Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)

output : (Tersedianya Jasa komunikasi, sumber air dan listrik berupa telepon dan internet).

3. (Nama Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan)

output : (Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah).

4. (Nama Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor)

output : (Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor).

5. (Nama Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja)

output : (Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor).

6. (Nama Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor)

output : (Tersedianya Alat tulis kantor).

7. (Nama Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan)

output : (Tersedianya barang cetakan dan penggandaan).

8. (Nama Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)

output : (Adanya bahan bacaan bagi pegawai).

9. (Nama Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman)

output : (Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu).

10. (Nama Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)

output : (Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah).

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD sebesar Rp.473.692.300,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.473.692.300,00 (tidak mengalami penambahan/pengurangan) dengan 6 (enam) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.362.406.000. atau 76,50%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.111.286.300. atau 23,50%.

Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Aparatur sehingga meningkatnya kualitas pelayanan.

1. (Nama Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional)

output : (Tersedianya kendaraan dinas kantor berupa 1 unit mobil).

2. (Nama Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

output : (Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor berupa 3 unit Almari Arsip, 1 unit Brankas, 3 unit Filling Kabinet, 2 unit Whiteboard).

3. (Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor)

output : (Tersedianya Peralatan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin hitung).

4. (Nama Kegiatan : Pengadaan Komputer) *output* : (Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 3 unit computer, 2 unit laptop, 2 unit printer).

5. (Nama Kegiatan : Pengadaan Meubelair) *output* : (Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 4 meja, 4 kursi).

6. (Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional)

output : (Terpeliharanya kendaraan dinas).

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada APBD sebesar Rp.20.695.000,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.47.145.000,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.26.450.000,00) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.43.490.000,00 atau 92,25%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.655.000,00 atau 7,75%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Meningkatnya disiplin aparatur

1. (Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya) *output* : (Tersedianya pakaian dinas pegawai berupa 24 stell PDH, 24 stell batik, 1 stell PSH, 1 stell PSL, 1 stell PSR).

2. (Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu) *output* : (Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu berupa 2 stell pakaian KORPRI dan 22 stell pakaian olahraga).

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada APBD sebesar Rp.60.000.000,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.60.000.000,00 (tidak mengalami penambahan/pengurangan) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.52.295.800 atau 87,16%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.7.704.200 atau 12,84%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. (Nama Kegiatan : Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Bagi PNS/Anggota KORPRI Tahun 2012) *output* : (Terlaksananya PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) bagi PNS/anggota KORPRI sebanyak 1 orang dalam membentuk LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) sehingga terwujud Pengayoman dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota KORPRI Yang Tersangkut Masalah Hukum).

2. (Nama Kegiatan : Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012) *output* : (Terlaksananya Pengukuhan & Pelantikan DP Kab/Kota KORPRI & DP Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Tahun Anggaran 2012).

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan pada APBD sebesar Rp.216.617.300,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.536.617.300,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.320.000.000) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.111.504.900 atau 20,78%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.425.112.400,00 atau 79,22%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah Meningkatnya pembinaan dan pemahaman aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. (Nama Kegiatan : Pemberiaan penghargaan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti) *output* : (Terlaksananya pemberian penghargaan dan bantuan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti).

Tidak terealisasi karena Paket pengadaan Cendera Mata berupa Cincin Emas, telah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Proses Lelang Paket Pengadaan cinderata Mata, namun dalam 2 kali lelang (Proses Lelang dan Lelang Ulang), proses pelelangan gagal karena hanya ada 1 (satu) rekanan yang mendaftar. Mengingat tidak cukupnya waktu untuk melaksanakan lelang ulang ke - 2 maupun waktu pelaksanaannya, sehingga kegiatan pemberian penghargaan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti (Paket Pengadaan Cinderata Mata berupa Cincin Emas) tidak dapat dilaksanakan.

2. (Nama Kegiatan : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tk. Nasional I) output : (Terlaksananya pengiriman MTQ KORPRI tingkat Nasional I sebanyak 4 cabang MTQ).

VI. Program Peningkatan Kesatuan Jiwa Korps dan Kebanggaan Terhadap Organisasi

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Kesatuan Jiwa Korps dan Kebanggaan Terhadap Organisasi pada APBD sebesar Rp.200.000.000,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.200.000.000,00 (tidak mengalami penambahan/pengurangan) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.188.345.000,00 atau 94,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.11.655.000,00 atau 5,83%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Kesatuan Jiwa Korps dan Kebanggaan Terhadap Organisasi adalah Meningkatnya rasa kebersamaan dan kesetiakawanan anggota KORPRI.

1. (Nama Kegiatan : Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) output : Terlaksananya Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VII. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada APBD sebesar Rp.376.531.400,00 Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp.626.531.400,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.250.000.000) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.608.666.300 atau 97,15%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.17.865.100 atau 2,85%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah Memasyarakatkan olahraga bagi aparatur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. (Nama Kegiatan : Pekan Olahraga KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Beitung) output : (Terpilihnya Atlet KORPRI yang berprestasi sebanyak 6 Cabang Olahraga).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 maka Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi Urusan pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai “*Pelaksana*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelaksana dalam hal ini Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

2.2.1 Tugas, Fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010.

SEKRETARIS DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tugas : melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
3. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

Tugas : melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan, personil perlengkapan serta evaluasi pengurusan laporan pelaksanaan program tahunan dan melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha dan pihak lain, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

A. Sub bagian Administrasi Umum dan keuangan

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan kas, pencatatan, penerimaan, pengeluaran, menyusun anggaran keuangan dan laporan pertanggungjawaban, melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

B. Sub Bagian Kerjasama

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan rencana kegiatan sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, mengadakan koordinasi, komunikasi, dokumentasi dan publikasi, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

Bagian Olahraga, Seni dan Budaya, Mental dan Rohani

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis operasional, pembinaan anggota KORPRI yang berminat dalam olahraga, mendorong segenap anggota untuk ikut menciptakan, memantapkan dedikasi demi kesatuan dan persatuan bangsa, pengkoordinasian dan menumbuhkan kembangkan kepedulian, kesetiakawanan sosial anggota KORPRI terbentuknya kelompok seni di SKPD dalam rangka mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional, pengembangan olahraga di SKPD, menyelenggarakan Pembinaan Badan Pembinaan Olahraga (BAPOR), Pekan Olahraga Daerah (PORDA) persiapan bahan pekan olahraga Provinsi dan Pekan olahraga Nasional,

pembinaan, mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan kegiatan kerohanian dan ikut serta dalam pelaksanaan hari besar keagamaan dan koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

A. Subbag Olahraga, Seni dan Budaya, Mental dan Rohani

Tugas : melakukan persiapan program bahan kebijakan kegiatan di bagian olahraga, seni dan budaya, membina anggota KORPRI yang berminat keolahragaan, pembinaan pengurus BAPOR KORPRI, menyelenggarakan PORPROV dan POPNAS KORPRI secara baik, mengkoordinasi dan membantu pengembangan olahraga setiap SKPD, memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kelompok seni dan budaya daerah dan nasional, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

B. Subbag Mental dan Rohani

Tugas : melakukan persiapan program bahan kebijakan kegiatan di bagian mental dan rohani, mendorong segenap anggota untuk ikut menciptakan, memantapkan dokumentasi demi kesatuan dan persatuan bangsa, mengkoordinasikan dan mengembangkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial anggota KORPRI, membantu, mendukung, penyelenggaraan pendidikan dan ilmu pengetahuan, mempersiapkan kegiatan kerohanian, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke Kabupaten/Kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

BAGIAN USAHA DAN BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL

Tugas: melaksanakan penyiapan program kebijakan kegiatan hubungan kerja di bagian usaha dan bantuan sosial dengan lembaga lainnya, pembentukan unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, penyelenggaraan pelayanan konsultasi, bantuan hukum bagi anggota serta keluarganya, pengkoordinasian, pengembangan kerjasama dengan unit koperasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan

kesejahteraan DPP KORPRI, kegiatan bhakti sosial, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke Kabupaten/Kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

A. Subbag Usaha dan Kesejahteraan

Tugas: menyiapkan program perumusan kebijakan kegiatan Sub Bagian usaha dan Kesejahteraan, melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga lain, membentuk unit usaha KORPRI, serta memupuk jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, mengkoordinasikan, pembinaan, pengembangan kegiatan usaha anggota, melaksanakan kerjasama unit koperasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan usaha dan kesejahteraan DPP KORPRI, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke Kabupaten/Kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

B. Subbag Bantuan Hukum dan Sosial

Tugas: menyiapkan program, perumusan kebijakan kegiatan sub bagian bantuan hukum dan sosial, mengkoordinasikan dan penyaluran bantuan hukum dan sosial, mengkoordinasikan dan penyaluran bantuan sosial untuk kegiatan pendidikan, keterampilan bagi anggota yang memasuki pensiun, meyalurkan bantuan sosial beasiswa bagi keluarga anggota, melaksanakan pembinaan, meningkatkan ilmu pengetahuan bagi keluarga anggota, mempersiapkan bahan dalam rangka kegiatan bhakti sosial, memberikan bantuan hukum bagi anggota dalam rangka pemenuhan hak-hak PNS yang sedang menjalankan tugas dan lembaga lainnya, kerjasama dengan instansi terkait, melaksanakan sosialisasi di bidang hukum dan sosial, koordinasi semua tingkatan dan instansi terkait, pembinaan ke Kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kerja kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010, struktur organisasi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIb;
- b. 3 (tiga) jabatan Kepala Bagian yang setara dengan jabatan eselon IIIb;
- c. 6 (enam) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;

2.2.2 Kepegawaian

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 17 pegawai (data sampai dengan Desember 2011), dengan status kepegawaian 17 orang PNS, 0 orang CPNS dan tenaga honorer yang berada di Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 17 orang. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S3 sebanyak 0 orang, S2 sebanyak 0 orang, S1 sebanyak 9 orang, D4 sebanyak 0 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMU sebanyak 6 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 6 orang.

Tabel. 6 .3
Klasifikasi PNS dan CPNS di Sekretariat DPP KORPRI
Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | | Jumlah |
|----|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Pasca Sarjana / S3 | - | - | - |
| 2 | Pasca Sarjana / S2 | - | - | - |
| 3 | Sarjana / S1 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Diploma-IV | - | - | - |
| 5 | Diploma-III | - | 1 | 1 |
| 6 | Diploma-I/ II | - | - | - |
| 7 | SLTA | 4 | 2 | 6 |
| 8 | SLTP | - | - | - |
| 9 | SD | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 10 | 7 | 17 |

Tabel. 6.4
Klasifikasi PNS dan CPNS di Sekretariat DPP KORPRI
Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering

| No | Eselonering | Jumlah Pegawai | | Jumlah |
|----|---------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | II A | - | - | - |
| 2 | II B | 1 | - | 1 |
| 3 | III A | - | - | - |
| 4 | III B | 2 | 1 | 3 |
| 5 | IV A | 3 | 3 | 6 |
| 6 | IV B | - | - | - |
| 7 | Non Eselon | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Fungsional | - | - | - |
| | Jumlah | 10 | 7 | 17 |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung

2.3.1 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang di hadapi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2 dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM pegawai pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung baik kualitas maupun kuantitasnya berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada urusan penyelenggaraan pemerintahan umum daerah.
2. Beberapa usulan rencana kerja kegiatan SKPD tidak sesuai dengan RPJMD 2007-2012 karena sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung baru terbentuk pada tanggal 28 Juni 2010, sehingga berakibat pada tidak sesuainya kegiatan dengan prioritas pembangunan.
3. Belum Tersinkronisasinya program KORPRI di semua tingkatan baik pusat, instansi terkait di provinsi maupun antara Kabupaten/Kota.
4. Belum tersedianya data base pendukung yang komprehensif sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan sehingga ketergantungan akan penyediaan data kepada unit kerja lain masih sangat tinggi.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pegawai pada Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dengan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun diluar daerah.
2. Pada tahun 2013 ini akan diusulkan rencana kerja kegiatan SKPD agar mengacu pada prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD 2012-2018.
3. Melakukan koordinasi di semua tingkatan baik pusat, instansi terkait maupun dengan kabupaten/kota secara berkala.
4. Melakukan pengembangan teknologi informasi yang tersedia dalam rangka mempermudah akses untuk memperoleh data yang diperlukan dan meningkatkan koordinasi antar instansi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah daerah.

6.4. Prestasi Kerja

Prestasi kerja yang dicapai Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti Pusat, Regional, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama DP KORPRI Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Semakin membaiknya kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 yaitu dengan adanya realisasi serapan anggaran sebesar Rp 3.207.100.382,00 atau 63,04 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.879.752.151,00 atau 36,96 %.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPP KORPRI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 – 2017.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 yaitu: **“Terwujudnya Organisasi yang Kuat, Netral, Demokratis untuk Membangun jiwa Korps (KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan Mensejahterakan Anggota dan Keluarganya”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung di rumuskanlah Misi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Berikut:

- 1. Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan.**
- 2. Membangun solidaritas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara.**
- 3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.**
- 4. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin, bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik.**
- 5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.**

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang berfungsi untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi atau lembaga. Dari tujuan akan mendapat kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan prioritas organisasi/lembaga dalam melaksanakan misi. Tujuan merupakan hasil akhir atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun.

Tujuan organisasi atau lembaga haruslah konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi/lembaga sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh organisasi/lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi lembaga serta visi dan misi, maka perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi/Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mewujudkan organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur organisasi yang sesuai di semua tingkatan kepengurusan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggotanya melalui pembinaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keusahaan serta hukum dan sosial.
5. Meningkatkan kerjasama dan fasilitasi dengan seluruh instansi terkait.

Sasaran

Sasaran adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berbagai sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepemimpinan.
2. Terciptanya solidaritas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara.

3. Terwujudnya kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.
4. Terciptanya Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin, bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik.
5. Terwujudnya KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Komputer

- e. Pengadaan Meubelier
 - f. Pengadaan Alat-alat Studio
 - g. Pengadaan Faximili
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - b. Pemberian Penghargaan kepada PNS yang memasuki masa purnabhakti dan bantuan kepada PNS/CPNS yang sakit dan meninggal dunia
 - c. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tk. Nasional II Banda Aceh 2014
 - d. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - e. Pembentukan LKBH KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - f. Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - g. Persiapan, Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan DP Kab/Kota KORPRI, DP Unit Provinsi dan DP Provinsi Kep. Babel Tahun 2013
 - h. Pembekalan Teknis Bagi PNS yang akan memasuki masa Purnabhakti
 - i. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi PNS/Anggota KORPRI

- j. Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (SOTK)
- k. Sosialisasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- l. Musyawarah Provinsi III KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

- a. Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI ke – 13 Tahun 2013
- b. Pembentukan Kepengurusan BAPOR KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2013-2018
- c. Pelatihan Instruktur senam bugar KORPRI bagi Sekretariat Kab/Kota dan SKPD dan Instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- d. Silaturahmi dan pertandingan olahraga antar KORPRI Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan KORPRI Provinsi Jawa Barat
- e. Pertandingan olahraga antar unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2014, Sebagaimana implementasi dari Renstra tahun 2012-2017, sesuai dengan Renstra Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun, maka untuk mencapai sasaran yang ada, telah disusun program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dananya berasal dari APBD sebagaimana terdapat pada tabel 5.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013
dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Nama SKPD : Sekretariat DPP KORPRI

Lembar..... Dari

| Urusan Pemerintahan | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2014 Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Pangkalpinang | | 1.079.816.000,00 | APBD | | | 1.079.816.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Pangkalpinang | | 128.900.000,00 | APBD | | | 128.900.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pangkalpinang | | 60.000.000,00 | APBD | | | 60.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Pangkalpinang | | 120.000.000,00 | APBD | | | 120.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | Pangkalpinang | | 75.900.000,00 | APBD | | | 75.900.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|-------------------------|------|--|--|-------------------------|
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Pangkalpinang | | 54.200.000,00 | APBD | | | 54.200.000,00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | Pangkalpinang | | 54.200.000,00 | APBD | | | 54.200.000,00 |
| | Program Pembinaan dan pengembangan aparatur | | Pangkalpinang | | 4.689.695.000,00 | APBD | | | 4.689.695.000,00 |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | | Pangkalpinang | | 75.000.000,00 | APBD | | | 75.000.000,00 |
| | Pemberian Penghargaan kepada PNS yang memasuki masa Purnabhakti dan bantuan kepada PNS/CPNS yang sakit dan meninggal dunia | | Pangkalpinang | | 3.486.880.000,00 | APBD | | | 3.486.880.000,00 |
| | Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tk. Nasional II Banda Aceh 2014 | | Pangkalpinang | | 472.280.000,00 | APBD | | | 472.280.000,00 |
| | Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Pangkalpinang | | 213.270.000,00 | APBD | | | 213.270.000,00 |
| | Pembentukan LKBH KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Pangkalpinang | | 233.200.000,00 | APBD | | | 233.200.000,00 |
| | Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Pangkalpinang | | 151.675.000,00 | APBD | | | 151.675.000,00 |
| | Persiapan pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan serta pelaporan DP Kab/Kota KORPRI, DP Uint Provinsi dan DP Provinsi Kep. Babel Tahun 2013 | | Pangkalpinang | | 57.390.000,00 | APBD | | | 57.390.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | | Pangkalpinang | | 1.263.496.000,00 | APBD | | | 1.263.496.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--|-------------------------|------|--|--|-------------------------|
| | Pelatihan instruktur senam bugar KORPRI bagi Sekretariat Kab/Kota dan SKPD dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | | Pangkalpinang | | 349.408.000,00 | APBD | | | 349.408.000,00 |
| | Silaturahmi dan pertandingan olahraga antar KORPRI Provinsi Kep. Babel dengan KORPRI Provinsi Jawa Barat | | Pangkalpinang | | 540.955.000,00 | APBD | | | 540.955.000,00 |
| | Pertandingan Olahraga Antar Unit KORPRI se Provinsi Kep. Babel | | Pangkalpinang | | 373.133.000,00 | APBD | | | 373.133.000,00 |
| | | | | | 7.366.677.000,00 | | | | 7.366.677.000,00 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 1 Tahun. Guna untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak serta aparatur Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung.

Perumusan dan penyusunan Renja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja ini. Penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Pangkalpinang, Januari 2014

SEKRETARIS DPP KORPRI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAJAMUDIN, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19580119 197910 1 001